

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aprianto, Bambang dan Jacob, Fonny Arisandy, 2013, *Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia*, Ppm Manajemen, Jakarta.
- Asyhadie, H Zaeni dan Sutrisno, Budi, 2012 *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta
- Ismail, Basuki Dalam Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara, 1997, *Sistem Administrasi Negara RI Edisi Ketiga*, Jakarta
- Muhammad, Abdul Kadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Organisasi Perburuhan Internasional, 2008, *Jaminan Sosial: Konsensus Baru*, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta
- Putri, Asih Eka, 2014, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, CV Komunitas Pejaten Mediatama, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- dan Marmudji, Sri, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

B. Tesis

Arly Faizal, 2017, “Implikasi Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga Pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 dan Aturan Hak Ketenagakerjaan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Paulus Sanjaya, 2016, “Penegakan Hukum atas ketentuan pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan menurut UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS (studi kasus BPJS Ketenagakerjaan diwilayah DKI Jakarta)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481)

Peraturan Peresiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

D. Internet

<http://news.koranbernas.id>, Peran Pemerintah Menentukan Suksesnya Program Jamsostek, 16 November 2016, diakses 20 Januari 2019

www.jurnalsosialsecurity.com, Peran Pemerintah Daerah Dalam Jaminan Sosial, 27 Juni 2016, diakses 20 Januari 2019

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html> diakses 10 April 2019

<http://repository.uin-suska.ac.id/6204/3/BAB%20%20II.pdf> diakses tanggal 02 Juli 2019

S. Maronie, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Dalam <http://www.zriefmaronie.blospot.com> diakses pada tanggal 02 Juli 2019